

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital bagi pembentukan karakter. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa atau masyarakat tidak akan pernah mendapatkan kemajuannya sehingga menjadi bangsa atau masyarakat yang kurang atau bahkan tidak beradab. Karena itu, sebuah peradaban yang memberdayakan akan lahir dari suatu pola pendidikan dalam skala luas yang tepat guna dan efektif bagi konteks dan mampu menjawab segala tantangan zaman. Pendidikan menjadi harapan dan tumpuan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia (Sudjatmiko, 2010: 1).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan di sini menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya tercipta sebuah wadah di mana peserta didik bisa secara aktif mempertajam dan memunculkan ke permukaan potensi-potensinya sehingga menjadi kemampuan-kemampuan yang dimilikinya secara alamiah (Latif, 2007: 7).

Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama, masa depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang bahagia. Namun saat ini dunia pendidikan kita belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak tuntas, atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorientasi proyek. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Hamalik, 2006: 4).

Kualitas lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan SDM yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa. Bahkan Sumber Daya Manusia yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi estafet kepemimpinan belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi karakter (Dompu, 2011: 2).

Kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini semakin terpuruk dan tidak seperti yang kita harapkan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia saat ini masih menjadi persoalan utama dalam bidang pendidikan di

Indonesia. Peningkatan kualitas SDM Indonesia sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadi penyebab tingginya angka pengangguran terbuka di Tanah Air. Industri maupun jasa perdagangan menuntut kualitas SDM yang baik untuk memenuhi kebutuhan para pekerjanya. Untuk itu, rendahnya kualitas tenaga kerja berimbas pada tingkat produktivitas dunia usaha Indonesia (Pratomo, 2011: 2).

Program pendidikan merupakan suatu proses peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan secara bertahap, sistematis dan sesuai kebutuhan pasar. Program pendidikan yang dikembangkan harus mampu menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan teknologi serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, peserta program pendidikan harus menguasai dasar-dasar keilmuan dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya dalam kegiatan produktif (Shanti, 2011: 1).

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan membuka program Sekolah Menengah Kejuruan. SMK sebagai lembaga yang menciptakan *Specific Human Capital* akan menciptakan tenaga kerja yang terampil pada bidang tertentu dengan *performance value* yang baik. Dengan terciptanya *performance value* yang baik, maka lulusan SMK mudah

untuk terserap ke dunia industri yang akan berimbas pada peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Di SMK, sejak awal siswa dididik untuk berkomitmen pada ketrampilan tertentu (*specific*) yang *match* langsung dengan kepentingan sektor usaha industri tertentu. Siswa SMK dibekali dengan ketrampilan praktis dan pengalaman kerja (semacam *on-the-jobtraining*) dalam kekhususan tertentu (Mahfud dan Novi, 2010: 2).

Salah satu program keahlian yang ada di SMK adalah teknik pemesinan. Program Keahlian Teknik Pemesinan merupakan program keahlian yang bergerak dalam bidang produksi. Standar kompetensi yang digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum program keahlian teknik pemesinan adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada bidang industri logam dan mesin. Secara khusus tujuan Program Keahlian Teknik Pemesinan adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten: (1) Bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah dalam bidang Teknik Pemesinan. (2) Memilih karir, berkompetisi, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang Teknik Pemesinan (Pentapagiyono, 2010: 2).

Untuk mencapai kompetensi program teknik pemesinan seperti yang diharapkan, maka diperlukan berbagai sarana dan prasarana sebagai pendukung, terlebih SMK merupakan lembaga pendidikan yang menitik beratkan pada kegiatan praktik. Situasi bengkel dan kondisi peralatan praktik pemesinan merupakan faktor penting yang mempengaruhi proses pembelajaran di SMK, dan

sekaligus menjadi tolok ukur dari kualitas lulusannya. SMK diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan cara memperbanyak pengalaman kerja praktik. Oleh karena itu waktu belajar di sekolah dialokasikan sebesar 70% untuk pembelajaran praktik, dan sebesar 30% digunakan untuk pembelajaran teori (Tukiman, 2009: 2).

Selain kondisi alat tata letak peralatan yang baik sangat membantu siswa dalam melaksanakan praktik pemesinan, tata letak ruang pemesinan perlu mendapat perhatian. Tata letak ruang pemesinan merupakan tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam ruang mesin yang berguna untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Pedoman yang digunakan dalam menyusun tata letak ruang pemesinan dapat dilakukan berdasarkan fungsi. Tata letak berdasarkan fungsi, peralatan/mesin yang sejenis dikelompokkan dalam suatu ruangan/bagian/seksi/unit yang sama. Dengan demikian maka pada bengkel mesin produksi akan ada beberapa unit bengkel berdasarkan jenisnya misalnya unit bubut, unit frais, unit gerinda, unit pemotongan dan sebagainya. Sedangkan bila berdasarkan produk, peralatan/mesin yang ada di bengkel dikelompokkan menurut kebutuhan untuk menghasilkan suatu jenis produk (Arief, 2010: 2).

Selain bentuk program dan tata letak, untuk mencapai kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan, kompetensi guru pada program keahlian teknik pemesinan sangat diperlukan, karena Guru merupakan salah satu unsur yang dianggap sangat menentukan tinggi-rendahnya mutu pendidikan di sekolah. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Guru yang profesional diharapkan menghasilkan lulusan yang

berkualitas. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme. Profesionalisme guru sebagai ujung tombak di dalam implementasi kurikulum di kelas yang perlu mendapat perhatian. Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses perkembangan siswa (Sumarno, 2011: 2).

Karena pentingnya guru dalam proses pembelajaran, maka guru dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas. Profesional memiliki tiga ciri di antaranya: *Pertama*, mengandung unsur pengabdian. *Kedua*, mengandung unsur idealisme. *Ketiga*, mengandung unsur pengembangan. Maksud dari unsur pengabdian yaitu setiap profesi harus dikembangkan untuk memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat, pelayanan itu dapat berupa pelayanan individual maupun kolektif (Bafadal, 2008: 46).

Guru profesional adalah guru yang memiliki mental yang tangguh, rasa tanggung jawab kepada profesi, anak didik dan tentunya Allah swt. Mental yang tangguh, rasa tanggungjawab merupakan motivasi utama seorang guru, dalam mengajar. Karena mengajar bukan hanya sekedar proses mentransfer ilmu pengetahuan semata, tetapi juga merupakan proses mendidik agar siswa berperilaku baik, memberi contoh teladan, serta mau belajar dari anak didik agar

hubungan timbal balik antara kedua belah pihak menjadi sinergi positif dalam membangun proses kegiatan belajar mengajar yang baik di sekolah. Maka sudah sepantasnya bila seorang guru harus selalu mau belajar dan mau memperbaiki segala kekurangannya (Wibisono, 2010: 3).

Seseorang akan bekerja secara profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (*ability*) dan motivasi (*motivation*). Maksudnya adalah seseorang akan bekerja secara profesional bilamana memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya seseorang tidak akan bekerja secara profesional bilamana hanya memenuhi salah satu di antara dua persyaratan di atas. Betapapun tinggi kemampuan seseorang ia tidak akan bekerja secara profesional apabila tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi. Sebaliknya betapapun tinggi motivasi kerja seseorang ia tidak akan sempurna menyelesaikan tugas-tugasnya bila ia tidak didukung oleh kemampuan (Zainurie, 2007: 2).

Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah melalui sertifikasi sebagai sebuah proses ilmiah yang memerlukan pertanggung jawaban moral dan akademis. Dalam *issu* sertifikasi tercermin adanya suatu uji kelayakan dan kepatutan yang harus dijalani seseorang, terhadap kriteria-kriteria yang secara ideal telah ditetapkan. Sertifikasi bagi para guru dan dosen merupakan amanah dari UU Sistem Pendidikan Nasional kita (pasal 42) yang mewajibkan setiap tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar yang dimilikinya. Singkatnya adalah, sertifikasi dibutuhkan untuk mempertegas standar kompetensi yang harus

dimiliki para guru dan dosen sesuai dengan bidang ke ilmuannya masing-masing. Dengan adanya sertifikasi akan memacu semangat guru dan dosen untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ilmu, dan profesionalisme dalam dunia pendidikan (Yaqien, 2009: 8).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal guru. Sebagai gambaran rinci keadaan kualifikasi pendidikan minimal guru di Indonesia sebagai berikut: Guru TK yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 119.470 (78,1%) dengan sebagian besar 32.510 orang berijazah SLTA. Di tingkat SD, guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 391.507 (34%) yang meliputi sebanyak 378.740 orang berijazah SMA dan sebanyak 12.767 orang berijazah D1. Di tingkat SMP, jumlah guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 317.112 (71,2%) yang terdiri atas 130.753 orang berijazah D1 dan 82.788 orang berijazah D2. Begitu juga di tingkat SMA, terdapat 87.133 (46,6%) guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal, yakni sebanyak 164 orang berijazah D1, 15.589 orang berijazah D2, dan 71.380 orang berijazah D3 (Komara, 2010: 3).

Gambaran jumlah guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal akan semakin besar persentasenya bila dilihat dari persyaratan kualifikasi pendidikan minimal guru yang dituntut oleh PP No. 19/2005 tentang SNP. Di samping itu, pada Pasal 28 PP tersebut, juga mempersyaratkan seorang guru harus memenuhi kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Kompetensi sebagai



agen pembelajaran ini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial (Anonim, 2010: 1).

SMK Binawiyata Sragen, merupakan salah satu SMK yang memiliki program keahlian pemesinan, bahkan program keahlian pemesinan di SMK Binawiyata Sragen, merupakan program keahlian unggulan, untuk mencapai prestasi siswa dalam penguasaan pemesinan, menuntut guru memiliki kinerja yang tinggi. Kinerja guru merupakan gambaran nyata profesionalisme yang dimiliki oleh seorang guru. Profesionalisme guru harus dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi yang secara nyata diperlakukan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kompetensi-kompetensi tersebut digunakan sebagai pemicu guru dalam melaksanakan kinerjanya sebagai pendidik.

Fakta empirik kondisi guru di SMK Binawiyata Sragen, khususnya pada program teknik pemesinan berjumlah 13 Guru dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik pemesinan, dan 11 guru telah memiliki sertifikat Guru, dengan tersedianya Guru yang telah memiliki sertifikasi tersebut secara administrasi telah memenuhi kompetensi yang disyaratkan sebagai guru teknik pemesinan, sehingga pengelolaan program teknik pemesinan di SMK Binawiyata Sragen seharusnya dapat mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dapat terbukti dengan ditetapkannya program teknik pemesinan, sebagai program unggulan di SMK Binawiyata Gemolong Kabupaten Sragen.

Selain profesional guru yang ditunjukkan dengan kompetensi guru, bentuk program keahlian teknik pemesinan, dan tata letak ruang pembelajaran merupakan hal yang sangat mendapat perhatian kepala sekolah. Dengan adanya

perhatian kepala sekolah terhadap kompetensi guru, bentuk program, dan tata letak ruang pembelajaran tersebut, program teknik pemesinan SMK Binawiyata Sragen menjadi program unggulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya penelitian untuk mengungkap bagaimana pengelolaan guru pada program keahlian pemesinan di SMK Binawiyata Sragen, dalam penelitian yang berjudul Pengelolaan Program Keahlian Teknik Pemesinan di SMK Binawiyata Kabupaten Sragen.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah Bagaimana karakteristik pengelolaan program keahlian teknik pemesinan SMK Binawiyata Kabupaten Sragen?. Fokus penelitian dibagi dalam 3 (tiga) subfokus.

1. Bagaimana karakteristik pengelolaan kurikulum program keahlian teknik pemesinan di SMK Binawiyata Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana karakteristik kompetensi guru program keahlian teknik pemesinan di SMK Binawiyata Kabupaten Sragen?
3. Bagaimana karakteristik tata letak ruang pembelajaran program keahlian teknik pemesinan di SMK Binawiyata Kabupaten Sragen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan program keahlian teknik pemesinan SMK Binawiyata Kabupaten Sragen, dan secara khusus bertujuan untuk.

1. Mendeskripsikan karakteristik pengelolaan kurikulum program keahlian teknik pemesinan di SMK Binawiyata Kabupaten Sragen.
2. Mendeskripsikan karakteristik kompetensi guru program keahlian teknik pemesinan di SMK Binawiyata Kabupaten Sragen.
3. Mendeskripsikan karakteristik tata letak ruang pembelajaran program keahlian teknik pemesinan di SMK Binawiyata Kabupaten Sragen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menjadi bahan rujukan dan bahan informasi untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.
- b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, terutama bidang kajian profesionalisme keguruan yang membahas tentang kinerja guru pemesinan SMK Binawiyata Kabupaten Sragen.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberi masukan bagi para pendidik dalam rangka meningkatkan kinerjanya, khususnya guru pemesinan.
- b. Memberi masukan pada lembaga pendidikan (SMK) untuk meningkatkan kinerja gurunya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

- c. Memberi masukan kepada pengambil kebijakan untuk menyusun suatu strategi dalam rangka meningkatkan kinerja guru.

#### **E. Daftar Istilah**

1. Program keahlian teknik pemesinan merupakan materi pelajaran (teori maupun praktik) yang bersifat keterampilan yang diberikan di SMK dalam membuat benda kerja atau produk dan itu di dukung dengan berbagai mesin, antara lain mesin bubut dan mesin frais/mesin milling.
2. Pengelolaan kurikulum program keahlian teknik pemesinan adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi perangkat pembelajaran yang digunakan pada program teknik pemesinan.
3. Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya.
4. Tata letak ruang pembelajaran merupakan tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam ruang pembelajaran yang berguna untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar.